

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hertanto, & Maryanah, T. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*, 2(1).
- Asyari, Y. (2018). *Sehari Sebelum Nyoblos, KPU Diskualifikasi Paslon Bupati Sinjai*. <https://www.jawapos.com/Berita-Sekitar-Anda/0185180/Sehari-Sebelum-Nyoblos-Kpu-Diskualifikasi-Paslon-Bupati-Sinjai>.
- Aulia, D. (2016). Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 56–68.
- Cresswell, W. J. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches* (Third). SAGE Publications.
- Dason, F. (2023). *Indepedensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) : Pare-Pare.
- detiksultra.com. (2018). *Ketua dan Anggota KPU Sultra Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik*. <https://Detiksultra.Com/Headline/Ketua-Dan-Anggota-Kpu-Sultra-Dilaporkan-Atas-Dugaan-Pelanggaran-Kode-Etik/>.
- DPR. (2022). *Komisi II*. <https://www.dpr.go.id/Tentang-Dpr/Alat-Kelengkapan-Dewan/2/Informasi-Tugas>.
- DPR. (2024). *Komisi II DPR RI RDP dengan KPU, BAWASLU, DKPP, dan DITJEN POLPUM KEMENDAGRI*. <https://www.youtube.com/Live/PYrVyM2oxss?Si=i8nJU9YGw7I-B2v4>.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach* (Sixth). New York : Routledge.
- Fahrozi, M. H., Silvana, S., & Nurhalizah, A. (2024). Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum. *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/yybq7m45>
- fh.ubl.ac.id. (2024). *KPU Berencana Hapus Sanksi Diskualifikasi Cakada Tidak Sampaikan LDK, Pengamat: Aturan Sudah Tetap*.
<https://Fh.Ubl.Ac.Id/2024/08/14/Kpu-Berencana-Hapus-Sanksi-Diskualifikasi-Cakada-Tidak-Sampaikan-Ldk-Pengamat-Aturan-Sudah-Tetap>.
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge* (1st ed.). Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
- Freeman, R. E. (1984). *judul Strategic Management : A Stakeholder Approach*. Massachusetts : Pitman.
- Helen, Z. (2020). Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Serentak yang Demokratis. *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 2(3), 208–219.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.562>
- ICW. (2024). Beri Toleransi Pada Paslon yang Tak Laporkan Dana Kampanye, KPU Buka Lebar Pintu Korupsi! <https://Antikorupsi.Org/Id/Beri-Toleransi-Pada-Paslon-Yang-Tak-Lapor-Dana-Kampanye-Kpu-Buka-Lebar-Pintu-Korupsi>.
- Imawan, R., & Nawangsari, E. R. (2025). Implementasi PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. *Jurnal Humaniora Revolutioner*, 9(1), 134–141.
- Jurdi, S. (2021). *Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- kab-landak.kpu.go.id. (2024). *Pengumuman Pasangan Calon yang Terlambat Menyampaikan LPPDK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024*. <https://kab-landak.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-pasangan-calon-yang-terlambat-menyampaikan-lppdk-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-landak-tahun-2024>
- Kab-melawi.kpu.go.id. (2024). *Pasangan Calon yang Terlambat Menyampaikan*

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. <https://kab-melawi.kpu.go.id/blog/read/pasangan-calon-yang-terlambat-menyampaikan-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-lppdk-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-melawi-tahun-2024>

kab-minahasasalatan.kpu.go.id. (2025). *Sejarah KPU.* <https://kab-minahasasalatan.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>

Kahir, I. (2018). *Didiskualifikasi KPU Sinjai, SBY-AMM Malah Menang Versi JSI.* <https://Fajar.Co.Id/2018/06/27/Didiskualifikasi-Kpu-Sinjai-Sby-Amm-Malah-Menang/>.

KBRMedia. (2024). *Ruang Publik KBR-Sanksi Diskualifikasi Cakada Tak Lapor Dana Kampanye Bakal Dihapus, Langkah Mundur?* <https://www.youtube.com/watch?v=ss2vx5daaC8>.

kpu.go.id. (2024). *Himpun Masukan untuk Sempurnanya PKPU Kampanye dan Dana Kampanye.* <https://nasionalnews.co.id/17271-2/>

KPU. (2024). *Rilis KPU : Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Pusat.* https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1RU1OajVpLgIAsA_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1766317903/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.kpu.go.id%2Fdmdocument%2F1705217843V2%2520PRESS%2520RELEASE%2520PENERIMAAN%2520LADK%2520PERBAIKAN%2520PARPOL.pdf/RK=2/RS=p2t_eDxHghJ8vgmQYlh7fISmbX0-

Meiliana, D., & Ihsanuddin. (2019). *KPU Coret Keikutsertaan 11 Parpol di 429 Wilayah karena Tak Lapor Dana Kampanye.* <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/22/16381731/kpu-coret-keikutsertaan-11-parpol-di-429-wilayah-karena-tak-lapor-dana?>

MetroTV. (2024). *Perludem Kritisi KPU yang Berencana Hapus Sanksi Diskualifikasi Bagi Peserta Pilkada yang Tak Lapor.* <https://www.youtube.com/watch?v=A176hOHXPyQ>.

- nasional.kontan.id. (2022). *Ini 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-7-anggota-kpu-dan-5-anggota-bawaslu-terpilih-periode-2022-2027>
- Pariadi, Damayanti, G. A. R., & Rifai, A. (2023). Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Unizar Recht Journal*, 2(3), 420–429.
- Prakoso, R. A. (2019). *Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Studi Di KPU Kota Palembang)*. Universitas Sriwijaya : Palembang.
- Ramadhan, M. N., & Sjarif, F. A. (2022). Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2750–2763.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3847>
- Rustam, A. (2021). Peran Wakil Rakyat dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 19(1), 55–60.
- Sindonews. (2024). *KPU Bakal Hapus Sanksi Diskualifikasi Cakada yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye*.
<https://www.youtube.com/watch?v=tY9xcOaqlhE>
<https://www.youtube.com/watch?v=tY9xcOaqlhE>
- Sumanto, D., & Nggilu, S. (2020). Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1(1), 39–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1594>
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta : Yayasan Perludem.
- Supriyanto, D., Wulandari, L., Pransiska, A., & Natalia, C. (2015). *Dana*

Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No 1/2015 Juncto UU No 8/2015. Jakarta : Yayasan Perludem.

- Tamara, S. (2025). *Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pilkada 2024*.
[https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pilkada 2024.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2024_Laporan%20Pemantauan%20Dana%20Kampanye%20Pilkada%202024.pdf)
- Tamara, S., Primayogha, E., Aulia, Y., Pratama, H. M., & Hafidz, K. A. (2024).
Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024.
[Https://Antikorupsi.Org/Id/Laporan-Pemantauan-Dana-Kampanye-Pemilu-2024](https://Antikorupsi.Org/Id/Laporan-Pemantauan-Dana-Kampanye-Pemilu-2024).
- Transparency International Indonesia. (2025). *Laporan tentang Kesenjangan Transparansi Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Indonesia 2024*. [Https://Ti.or.Id/Books/Ballot-Heist-Laporan-Tentang-Kesenjangan-Transparansi-Pendanaan-Kampanye-Dalam-Pemilihan-Gubernur-Indonesia-2024/](https://Ti.or.Id/Books/Ballot-Heist-Laporan-Tentang-Kesenjangan-Transparansi-Pendanaan-Kampanye-Dalam-Pemilihan-Gubernur-Indonesia-2024/).
- utamanews.id. (2020). *Meski Terlambat KPU Terima LPPDK Yutuber*.
[Https://Utamanews.Id/2020/12/07/Meski-Terlambat-Kpu-Terima-Lppdk-Yutuber/](https://Utamanews.Id/2020/12/07/Meski-Terlambat-Kpu-Terima-Lppdk-Yutuber/).
- www.kpu.go.id. (2025a). *Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
<https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>
- www.kpu.go.id. (2025b). *Tugas dan Kewenangan KPU*.
<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>
- www.tempo.com. (2024a). *Alasan CONSID Minta KPU Tak Hapus Sanksi Diskualifikasi Soal Pelaporan Dana Kampanye*.
<https://www.tempo.co/pemilu/alasan-consid-minta-kpu-tak-hapus-sanksi-diskualifikasi-soal-pelaporan-dana-kampanye-28942>
- www.tempo.com. (2024b). *Anggota Komisi II DPR Sebut Kandidat Pilkada Tak Lapor Dana Kampanye Tetap Kena Sanksi*.
[Https://Www.Tempo.Co/Politik/Anggota-Komisi-Ii-Dpr-Sebut-Kandidat-](https://Www.Tempo.Co/Politik/Anggota-Komisi-Ii-Dpr-Sebut-Kandidat-)

Pilkada-Tak-Lapor-Dana-Kampanye-Tetap-Kena-Sanksi--30840.

- Yobel, T. H. (2021). Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(2), 174–199. <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1110>
- Yuharmafitri, Y., Putri, I. A., & Ariany, R. (2023). Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2874–2885. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1755>
- Zainul. (2019). Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(65), 7681–7724. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/jib.v41i65.705>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum